

Judul : Curhat Forum SMK - Kurikulum Berbeda dengan Dunia Kerja  
Tanggal : Jumat, 22 Maret 2024  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 8

## Curhat Forum SMK Kurikulum Berbeda Dengan Dunia Kerja



Dede Yusuf

KOMISI X DPR menggelar rapat dengan Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia dan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi, Rabu (20/3/2024). Kedua forum tersebut mengeluhkan kurangnya perhatian Pemerintah terhadap nasib sekolah kejuruan di Indonesia.

Wakil Ketua Komisi X DPR Dede Yusuf menegaskan, masukan dari dua forum ini menjadi catatan penting untuk didiskusikan bersama Pemerintah.

"Terima kasih Pak, masukan-masukannya sangat berharga sekali. Ini membuka mata kita," kata Dede Yusuf.

Anggota Fraksi Demokrat ini mengatakan, situasi yang dihadapi SMK Penerbangan saat ini memang patut menjadi perhatian, terutama soal kurikulum pendidikan dan penyerapan dunia kerja.

"Kalau tadi saya sekilas coba *browsing*, memang industri penerbangan ini harus menaikkan *grade*-nya. Sejak 2016, banyak permasalahan pesawat, sehingga akhirnya harus mengambil IDI ke atas," ujarnya.

Menurut Dede, harusnya tidak ada masalah lulusan SMK Penerbangan masuk terserap ke dunia kerja. Hal ini jika ada komitmen antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terutama dalam hal kurikulum.

"Kalau ada kurikulum yang tidak masuk dan sebagainya, nanti kita akan sampaikan. Ini baru awal saja," tambahnya.

Anggota Komisi X DPR Muhammad Nur Purnama Sidi menyarankan Pimpinan Komisi X DPR mengagendakan rapat dengar pendapat antara Kemendikbud Ristek dengan Kemenhub. Apalagi yang dikeluarkan forum SMK Penerbangan ini soal adanya ketidaksepahaman bersama antara dua institusi Pemerintah dalam hal kurikulum.

Penyelesaian masalah yang dihadapi ini, kuncinya ada dalam dengar pendapat antara Kemendikbud Ristek dan Kemenhub nanti. Sebab, ketika standar yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek ini tidak sama dengan Kemenhub sebagai *user* yang akan menggunakan jebolan dari sekolah penerbangan, tentunya dapat berimbas kepada kebijakan-kebijakan yang lainnya.

"Termasuk penganggarnya, segala macam itu akan berdampak. Nah, rapat dengar pendapat ini perlu kita lakukan. Karena ini menyangkut 45 SMK yang melibatkan kurang lebih 13.323 siswa. Anak-anak kita ini tidak jelas masa depannya," jelasnya.

Sementara, Ketua Forum Komunikasi SMK Penerbangan Indonesia Makmur Syukra meminta Komisi X DPR menindaklanjuti aspirasi mereka mengingat kurangnya perhatian pemerintah terhadap SMK khususnya SMK Penerbangan.

"Kami di SMK Penerbangan merasa dianaktirikan dalam pendidikan SMK yang ada di Indonesia," katanya.

Dijelaskan dia, sejatinya SMK Penerbangan di Indonesia ini jumlahnya mencapai 48 sekolah dan berada dari Sabang sampai Merauke. Hanya saja, dalam beberapa tahun ini, pihaknya mengalami masalah yang sangat luar biasa, lantaran jumlah SMK Penerbangan yang sedikit, namun kurang mendapat perhatian dari Pemerintah.

"Kami agak tersingkirkan begitu. Tapi kami tetap berupaya menciptakan atau menghasilkan lulusan-lulusan yang bisa berdaya guna untuk meneruskan perawatan pesawat terbang," katanya. ■ KAL